

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEGREGASI KELAS BERBASIS  
GENDER DI SMPI AL MAARIF 01 SINGOSARI**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Derajat Gelar S-2  
Program Studi Magister Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan**



**Disusun oleh :**

**NADZIFATUL MU'TAMAROH**

**NIM: 201610240211011**

**DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
Agustus 2018**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEGREGASI KELAS BERBASIS  
GENDER DI SMPI AL MAARIF 01 SINGOSARI**

**NADZIFATUL MU'TAMAROH  
201610240211011**

Telah disetujui

Pada hari/tanggal, **Senin / 01 Agustus 2018**

Pembimbing Utama



**Dr. Yuni Pantiwati**

Direktur  
Program Pascasarjana



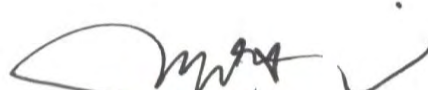
**Akhsanul Ulaam, Ph.D**

Pembimbing Pendamping



**Dr. Agus Tinus**

Ketua Program Studi  
Magister Kebijakan dan  
Pengembangan Pendidikan



**Dr. Agus Tinus**

# **T E S I S**

**NADZIFATUL MU'TAMAROH**  
**201610240211011**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
pada hari/tanggal, Senin/ **01 Agustus 2018**  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Malang



## **SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

**Ketua / Penguji : Dr. Yuni Pantiwati**  
**Sekretaris / Penguji : Dr. Agus Tinus**  
**Penguji : Dr. Mahfud Effendi**  
**Penguji : Dr. Estu Widodo**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **NADZIFATUL MU'TAMAROH**

NIM : **201610240211011**

Program Studi : **Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul: **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEGREGASI KELAS BERBASIS GENDER DI SMPI AL MAARIF 01 SINGOSARI.**

Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 01 Agustus 2018

Yang menyatakan,



**NADZIFATUL MU'TAMAROH**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat-Nya, sehingga Tesis ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Tesis ini dibuat untuk tujuan akademis sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Malang, serta disusun secara sistematis agar mempermudah memahami materi yang disajikan didalamnya. Selama pencarian referensi dan penyusunan tesis ini, tidak sedikit kendala yang penulis hadapi, namun berkat arahan dan bimbingan dari pihak-pihak terkait, maka kendala tersebut dapat diatasi. Untuk itu, secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang akan penulis sampaikan kepada:.

1. Akhsanul In'am, Ph.D selaku Direktur Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan tugas kepada dosen untuk mengantarkan dan membimbing kami dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Dr. Agus Tinus, M. Pd selaku Ketua Program studi Magister Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan dan selaku dosen pembimbing, arahan selama proses penentuan judul, penyusunan proposal, penelitian, hingga penyusunan hasil penelitian dan tesis.
3. Dr. Yuni Pantiwati, M.M, M.Pd selaku pembimbing utama, arahan dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi selama menjadi dosen pembimbing pendamping. Membimbing dengan penuh kesabaran dan ketulusan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
4. Bapak dan Ibu dosen Program Pascasarjana yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menuntut ilmu di program pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan dan motivasi hingga tesis ini dapat terselesaikan.

6. Semoga Allah SWT memberikan balasan setimpal atas segala pengorbanan dan bantuan yang telah diberikan,

Penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca pada umumnya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini jauh dari kata sempurna. Penulis mengharapkan kritik beserta saran yang dapat membangun untuk kesempurnaan tesis ini.

Malang, 01 Agustus 2018

Penulis,



## ABSTRAK

Nadzifatul Mu'tamaroh. (2018). *Implementasi kebijakan segregasi kelas berbasis gender di SMPI al Maarif Singosari Malang*. Tesis, Magister kebijakan dan Pembangunan Pendidikan Universita Muhammadiyah Malang, Pembimbing: (1) Dr. Yuni Pantiwati, MM, M.Pd, (2) Dr. Agustinus, M.Pd.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: 1) Implementasi kebijakan segregasi kelas berbasis gender; 2) Kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan segregasi kelas berbasis gender dan upaya sekolah dalam mengatasi masalah yang dihadapi dalam implemementasi kebijakan segregasi kelas berbasis gender. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu: 1) Kepala sekolah; 2) Kesiswaan; 3) Guru tatib; 4) Guru bimbingan konseling; 5) Guru mata pelajaran 6) Peserta didik dan wali murid. Penelitian ini dilaksanakan di SMPI al Maarif 01 Singosari. Teknik pengumpulan data yaitu Wawancara, observasi dan dokumnetasi. Tahapan analisis yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Untuk mengecek keabsahan data menggunakan trianggulasi data dan sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi kebijakan segregasi kelas berbasis gender proses penerapannya dilakukan dengan cara pemisahan kelas antara kelas laki-laki dan kelas perempuan, mulai dari kelas VII, VII dan X akan tetapi dalam satu gedung, satu organisasi dan didukung dengan diterapkannya tata tertib. 2) Hambatan dan solusi yang dihadapi sekolah dalam menjalankan kebijakan yaitu: sikap siswa putra kurang setuju adanya kebijakan hal tersebut berdampak pada suasana kelas pada saat jam pembelajaran kurang kondusif. Solusi yang dilakukan sekolah, dengan memberikan pendekatan dan arahan terhadap siswa, dan setiap guru dan khususnya guru bimbingan konseling dan guru mata pelajaran harus mengetahui segala problema yang sering terjadi pada siswa SMPI al Maarif untuk dievaluasi secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Segregasi Gender, Implementasi Kebijakan

## ABSTRACT

Nadzifatul Mu'tamaroh. (2018). *The implementation of gender-based class segregation policy in Islamic Middle School al Maarif Singosari Malang*. Thesis, Master of Policy and Educational Development, University of Muhammadiyah Malang, Advisor: (1) Dr. Yuni Pantiwati, MM, M.Pd, (2) Dr. Agustinus, M.Pd.

The purpose of this study was to describe: 1) Implementation of gender-based class segregation policies; 2) Constraints faced in the implementation of gender-based class segregation policies and school efforts to overcome problems encountered in implementing gender-based class segregation policies. The type of research used is descriptive qualitative, namely: 1) Principal; 2) Student Affairs; 3) Teachers of standing orders; 4) Counseling guidance teacher teacher; 5) Subject teachers 6) Students and student guardians. This research was carried out at SMPI al Maarif 01 Singosari. Data collection techniques are interview, observation and documentation. The analysis phase used is data collection, data reduction, data presentation, conclusion drawing. To check the validity of the data using data and source triangulation.

The results showed that: 1) The implementation of the gender-based class segregation policy process of its implementation was carried out by separating classes between male and female classes, from grades VII, VII and X but in one building, one organization and supported by the implementation of orderly. 2) Barriers and solutions faced by schools in carrying out policies are: attitudes of male students disagree with the existence of policies that have an impact on the class structure when learning hours are less conducive. The solution that is done by the school, by giving approaches and direction to students, and every teacher and especially the counseling guidance teacher and subject teachers must know all the problems that often occur to al Maarif SMPI students to be evaluated on an ongoing basis.

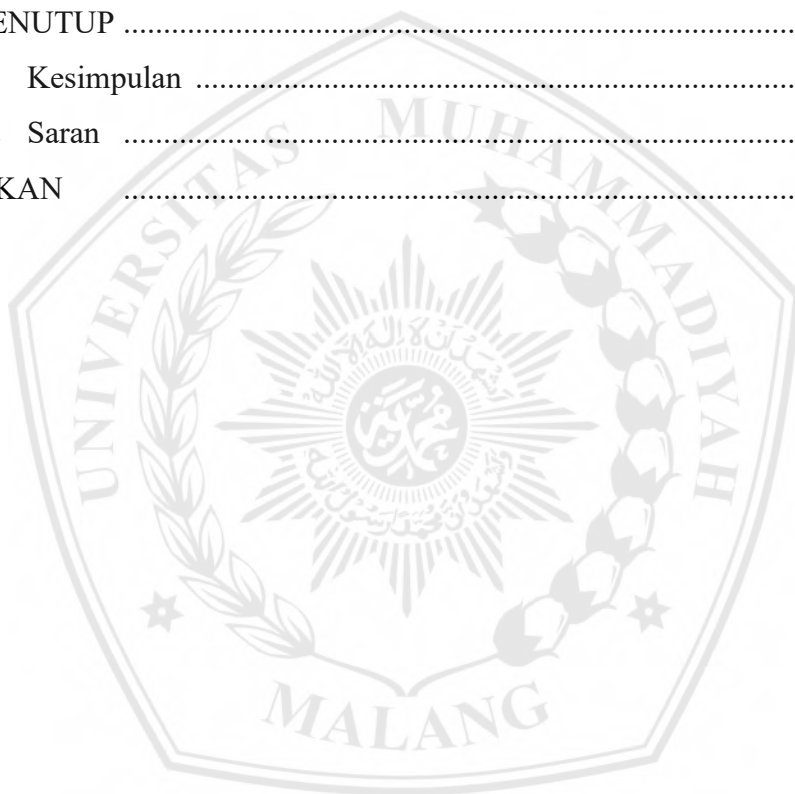
**Keywords:** Gender Segregation, Policy Implementation



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
SURAT PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
1. PENDAHULUAN .....	1
2. KAJIAN PUSTAKA.....	3
2.1 Implementasi Kebijakan Pendidikan .....	3
2.2 Konsep Segregasi Kelas Berbasis Gender .....	5
2.3 Model Segregasi Kelas Berbasis Gender .....	6
2.4 Dasar Segregasi Kelas Berbasis Gender .....	7
2.5 Penelitian Terdahulu .....	9
2.6 Kerangka Berpikir.....	11
3. METODE PENELITIAN .....	11
3.1 Pendekatan Dan Jenis Peneliti .....	11
3.2 Lokasi Penelitian dan Subyek Penelitian .....	12
3.3 Data Dan Sumber Data .....	12
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	12
3.5 Teknik Analisis Data .....	13
3.6 Pengujian Keabsahan Data .....	13
4. HASIL PENELITIAN .....	14
4.1 Impelementasi Kebijakan Segregasi Kelas Berbasis Gender	
Di SMPI Al Maarif Singosari .....	14
4.1.1 Komunikasi .....	14
4.1.2 Sumber Daya.....	16
4.1.3 Disposisi.....	17
4.1.4 Struktur Birokrasi.....	18
4.2 Faktor Penghambat Dan Solusi Yang Dihadapi Sekolah Pada Implementasi	
Kebijakan Segregasi Kelas Berbasis Gender .....	19

5. PEMBAHASAN .....	22
5.1 Implementasi Kebijakan Segregasi Kelas Berbasis Gender Di SMPI Al Maarif 01 Kota Malang .....	22
5.1.1 Komunikasi.....	23
5.1.2 Sumber data .....	23
5.1.3 Disposisi.....	24
5.1.4 Struktur Birokrasi.....	26
5.2 Faktor Penghambat Dan Solusi Yang Dihadapi Sekolah Dalam Implementasi Kebijakan Segregasi Gender .....	27
6. PENUTUP .....	29
6.1 Kesimpulan .....	29
6.2 Saran .....	30
RUJUKAN .....	31



## DAFTAR BAGAN

2.6.1 Kerangka Berpikir Kebijakan Segregasi kelas berbasis gender.....	11
--	----



## 1. PENDAHULUAN

Pendidikan Nasional di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang pasal 1 ayat 1 No.20 Tahun 2003 yaitu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis serta bertanggung jawab. Hal ini harus diwujudkan dengan pendidikan yang memanusiakan manusia Indonesia (Ampera, 2012; Nasional, 2003; Yulianto, 2013).

Moralitas generasi muda yang cenderung semakin jauh dari tatanan nilai-nilai yang baik (Darmiyati, 2008). Dampak dari perubahan ini tidak bisa dielakan baik yang berdampak positif maupun negatif, seolah melengkapi degradasi moral dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial, dan dunia pendidikan yang seharusnya menjadi pelopor dalam pengembangan moralitas. Tantangan pendidikan utamanya menjadi kunci penting sebagai *filter* dan mempersiapkan generasi yang mampu bersaing dengan berbagai tantangan zaman yang kompleks salah satu indikator utama ialah berakhlak mulia. Jika kita lihat kondisi pendidikan di Indonesia saat ini, ternyata masih belum sesuai yang diharapkan, proses pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya berhasil membangun manusia yang berkarakter positif (Trisakti, 2016). Sistem pendidikan belum mampu melahirkan manusia yang berkepribadian agama mampu menguasai sains dan teknologi. Di tengah arus globalisasi yang menggerus nilai-nilai kehidupan, eksistensi sekolah agama menjadi sangat dibutuhkan untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut, tidak saja sisi moralitas dan spiritualitas tetapi juga intelektualitasnya. Dengan begitu, maka sekolah agama harus mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan pengelolaan pembelajarannya untuk mencetak sumber daya insani yang bisa diandalkan menghadapi segala bentuk perubahan yang ada (Nasional, 2003; Tirtarahardja, 2005).

Segregasi kelas berbasis gender merupakan pemisahan kelas laki-laki dan perempuan adalah model pemisahan yang membagi peserta didik berdasarkan jenis kelamin, jadi peserta didik yang berjenis kelamin laki-laki berada dalam satu ruang kelas dengan jenis kelamin sama begitu juga sebaliknya. Hal itu bertujuan agar peserta didik di dalam proses pembelajaran lebih fokus dan juga

menjaga pergaulan peserta didik laki-laki dan perempuan. Adanya kondisi yang sama ini bisa memudahkan guru dalam pemberian layanan yang sama pada peserta didik (Megasari, 2014). Oleh karena itu SMPI al-Maarif 01 Singosari lembaga pendidikan sebagai ikhtiar dalam menyiapkan generasi masa depan. Dengan menerapkan kebijakan segregasi kelas berbasis gender diharapkan dapat meningkatkan prestasi peserta didik dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena lembaga pendidikan yang merupakan terjadinya proses sosialisasi, sehingga mempengaruhi pribadi anak dan perkembangan sosialnya. Interaksi yang dilakukan peserta didik laki-laki dan perempuan di sekolah sering kali menimbulkan akibat sampingan yang negatif bagi perkembangan mental anak remaja (Ahmad, 2017).

Segregasi kelas berbasis gender yaitu aturan yang berlandaskan pada agama yang dijadikan dasar dalam penerapan pemisahan kelas oleh SMPI al-Maarif 01. Dalam Islam laki-laki dan perempuan merupakan dua jenis yang akan menimbulkan syahwat bila saling memiliki pandangan khusus keduanya, sehingga keseringan bertatap muka antara laki-laki dan perempuan dihindari dengan sistem segregasi kelas berbasis gender (Rohmawati, 2016). Jika antara laki-laki dan perempuan berduaan, semua itu akan menimbulkan fitnah. Jika ditinjau dari sisi negatifnya akan terjadinya daya pandang yang menimbulkan syahwat. Upaya untuk menindak lanjuti hal tersebut diatur dengan diberlakukannya kebijakan segregasi kelas berbasis gender di lembaga sekolah SMPI al-Maarif 01. Dalam implementasi kebijakan segregasi kelas berbasis gender tersebut dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam dunia pendidikan. Kebijakan tersebut juga menjawab dari beberapa masalah yang ditimbulkan dari percampuran kelas laki-laki dan perempuan. Diantaranya adalah peserta didik putra seringkali mengganggu/jail terhadap peserta didik putri saat jam pelajaran berlangsung dan menimbulkan hilangnya fokus belajar pada peserta didik. Permasalahan lain yang timbul biasanya terjalannya sosialisasi antara laki-laki dan perempuan yang mengarah kesisi negatif.

Hubungan prestasi belajar dengan kebijakan segregasi kelas berbasis gender bahwa kelas yang dipisah laki-laki dan perempuan lebih kreatif dibandingkan kelas campuran karena bagi peserta didik kelas yang ada lawan jenisnya membuat

peserta didik tidak fokus dalam belajar (Muafiah, 2013). Beberapa hasil penelitian menunjukkan, penerapan kebijakan segregasi kelas berbasis gender kelas yang dipisah lebih berprestasi dan membuat peserta didik lebih fokus belajar (Yulianto & Dwijananti, 2013). Implementasi kebijakan segregasi kelas berbasis gender diterapkan di sekolah SMPI al Maarif 01 Singosari dikarenakan adanya lawan jenis dalam kelas campuran membuat peserta didik laki-laki dan perempuan terkena dampak negatif dalam pergaulan seperti adanya pelanggaran perilaku peserta didik yang menyimpang terhadap lawan jenis, meskipun tidak semuanya. Ada sebagian peserta didik justru bersemangat dalam belajar dengan adanya lawan jenis, Penerapan kebijakan segregasi kelas berbasis gender yang diterapkan di SMPI al Maarif 01 Singosari didasarkan pada permasalahan yang di sekolah tersebut. Peserta didik perempuan merasa terganggu dengan adanya peserta didik laki-laki yang berakibat tidak fokus belajar pada saat jam pelajaran berlangsung, selain itu untuk bagi sekolah salah satu cara untuk menjaga peserta didik dari pergaulan lawan jenis dan membiasakan perilaku-perilaku yang baik terhadap lawan jenis (Syaifuddin, 2017).

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji kebijakan segregasi kelas berbasis gender. Sejalan dengan hal tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian berdasarkan permasalahan berikut: 1) Bagaimana implementasi kebijakan segregasi kelas berbasis gender di SMP Islam al Maarif 01?; 2) Bagaimana penghambat dan solusi sekolah dalam implementasi kebijakan segregasi kelas berbasis gender di SMP Islam al Maarif 01?.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **2.1 Implementasi Kebijakan Pendidikan**

Implementasi kebijakan pendidikan cukuplah penting karena dengan suatu kebijakan akan mengarahkan suatu tujuan pendidikan dapat tercapai. Keberadaan kebijakan dalam pendidikan dapat dinilai penting sehingga sangat diperlukan dalam pendidikan. Kebijakan pendidikan adalah arah tindakan yang mempunyai tujuan yang ditetapkan oleh seperangkat aturan pemerintah dalam bidang pendidikan untuk mengatur pengelolaan sekolah mulai dari kurikulum, pedagogik, penilaian, guru, dan pemeliharaan fisik sekolah (Leo, 2006; Mujianto, 2015, Fattah, 2013). Implementasi kebijakan merupakan suatu proses dinamis, di mana

pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya mendapat suatu hasil sesuai dengan tujuan dan saran kebijakan (Rahman, 2015, Rawita, 2010).

Pendekatan yang digunakan dalam implementasi kebijakan adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Implementasi kebijakan dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (*Communications*), Sumber Daya (*resources*), sikap (*dispositions atau attitudes*) dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Model implementasi kebijakan ini berperspektif *top down* dikembangkan model George C. Edwards III menamakan model implementasi dengan istilah *Indirect Impact on Implementation*. Edward III mendefinisikan implementasi sebagai tahapan dalam proses kebijakan yang berada diantara tahapan penyusunan kebijakan dan hasil atau konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijakan itu (*output, outcome*) melalui model yang dikembangkan. Edward III mengemukakan empat penjelasan yaitu:

- a. Komunikasi: implementasi suatu kebijakan agar mencapai keberhasilan, mensyaratkan implementor agar mengetahui apa yang dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi sasaran dan tujuan kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran sehingga dapat mengurangi distorsi implementasi;
- b. Sumber daya merupakan informasi yang mampu menjadikan kebijakan berhasil adalah sumber daya yang dimiliki oleh implementator. Sumber daya pendukung dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya fasilitas. Tanpa adanya sumber daya maka kebijakan tidak akan berjalan dengan semestinya. Bahkan kebijakan tersebut akan menjadi dokumen saja;
- c. Disposisi adalah sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran dan respon pelaksana. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan;

- d. Struktur Birokrasi. Pada implementasi kebijakan, struktur organisasi memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standart. (Leo, 2006; Subarsono, 2011).

## **2.2 Konsep Segregasi Kelas Berbasis Gender**

Secara umum berdirinya model segregasi kelas berbasis gender tersebut didasarkan pada mengakarnya pemahaman terhadap karya-karya fiqih jaman pertengahan yang banyak mengharamkan pertemuan antara laki-laki dan perempuan di satu tempat bahkan mengharamkan munculnya perempuan di ranah publik (Muafiah, 2013).

Secara etimologis istilah segregasi berasal dari kata “*segregate*” (diartikan memisahkan, memencilkan) atau “*segregation*” (diartikan pemisahan). Para ilmuwan mengartikan segregasi sebagai proses pemisahan suatu golongan dari golongan lainnya; atau pengasingan; atau juga pengucilan. Segregasi adalah pemisahan atau pengasingan (Casmini, 2017). Segregasi kelas merupakan aturan yang berlandaskan pada agama. Dalam Islam laki-laki dan perempuan merupakan dua jenis yang akan menimbulkan syahwat bila saling memiliki pandangan khusus keduanya, sehingga keseringan bertatap muka antara laki-laki dan perempuan dihindari dengan sistem segregasi kelas. Jika ditinjau dari sisi negatifnya akan ada terjadinya daya pandang yang menimbulkan syahwat, segregasi kelas sangat tepat diterapkan, jika ditinjau dari segi positifnya. (Rohmah, 2008). Berkaitan dengan pendidikan, pendidikan segregasi adalah suatu sistem pendidikan bagi peserta didik yang dipisah kelas pembelajarannya saja, antara laki-laki dengan perempuan yang berlandaskan agama. Pemisahan yang terjadi hanya pada ruang kelas tetapi mencakup keseluruhan program penyelenggaraannya.

Kata gender berasal dari Inggris, gender berarti jenis kelamin. Gender dapat diartikan sebagai perbedaan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan perilaku. Secara kodrat, memang diakui adanya perbedaan (*distinction*), bukan pembedaan (*discrimination*) antara laki-laki dengan perempuan yaitu dalam aspek biologis. Perbedaan secara biologis antara laki-laki dengan perempuan yaitu senantiasa digunakan untuk menentukan dalam relasi gender, seperti pembagian status, hak-hak, peran, dan fungsi di dalam masyarakat (Sumbuha, 2008). Gender adalah perbedaan perilaku antara



perempuan dan laki-laki yang dikonstruksi secara sosial, diciptakan oleh laki-laki dan perempuan sendiri; oleh karena itu merupakan persoalan budaya. Gender merupakan perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis adalah perbedaan jenis kelamin yang bermuara dari kodrat Tuhan, sementara gender adalah perbedaan yang bukan kodrat Tuhan, tetapi diciptakan oleh laki-laki dan perempuan melalui proses sosial budaya yang panjang. Gender pada dasarnya berarti membahas hubungan kekuasaan yang sifatnya sangat pribadi yakni menyangkut dan melibatkan individu kita masing-masing serta menggugat privilege yang kita miliki dan sedang kita nikmati selama ini. Oleh karena itu pemahaman atas konsep gender sesungguhnya merupakan isu mendasar dalam rangka menjelaskan masalah hubungan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki (Muawanah, 2009).

### **2.3 Model Segregasi Kelas Berbasis Gender**

Sekolah yang mengimplementasikan segregasi kelas berbasis gender adalah sekolah yang model pembelajarannya memisahkan antara peserta didik laki-laki dan perempuan dengan tujuan tergalinya potensi dan kemampuan masing-masing peserta didik secara maksimal. Oleh karena itu sekolah dengan model segregasi kelas berbasis gender ini memiliki tiga model. Yaitu a) Segregasi secara penuh, yakni model sekolah yang pemisahannya dilakukan secara menyeluruh baik kelas pembelajaran, struktur organisasi sekolah sampai pada tempat dan lingkungan sehingga meniscayakan tiada komunikasi dengan peserta didik yang berlainan jenis; b) Segregasi tidak penuh, yakni model sekolah yang pemisahannya hanya terletak pada kelas pembelajarannya, sementara struktur organisasi sekolah dan yayasan masih menjadi satu; c) Segregasi dalam mata pelajaran tertentu. Yakni model sekolah yang kelas pembelajarannya memisahkan antara laki-laki dan perempuan, namun lokasi, struktur organisasi dan yayasan dalam satu wadah (Kreitz-Sandberg, 2013; Muafiah, 2013).

Keberadaan lembaga pendidikan dalam kaitannya dengan pengelolaan pembelajaran di kelas terhadap peserta didik laki-laki dan perempuan yaitu tiga model (Jackson, 2002): a) *Single Sex Education* (SSE), yakni model sekolah yang proses pembelajarannya dilakukan secara terpisah antara peserta didik laki-laki dan perempuan. Pemisahan tersebut struktur organisasi sekolahnya atau hanya

pemisahan ruang belajarnya. Keduanya tetap dalam satu yayasan. Sekolah model ini biasanya diterapkan pada sekolah menengah yang berada di lingkungan pendidikan yang didirikan oleh lembaga agama; b) *Co-Education* (CE) yakni model sekolah yang menyatukan peserta didik laki-laki dan perempuan dalam satu kelas yang sama dan di sekolah yang sama. CE biasanya diterapkan di sekolah milik pemerintah, sekolah swasta non agama atau sekolah swasta agama selain di lingkungan pesantren; c) *Mix-Education* (ME) yakni model campuran, yaitu sekolah yang memiliki kelas campuran untuk beberapa mata pelajaran tertentu dan memisahkan peserta didiknya pada mata pelajaran lainnya (Anthony, 1986; Muafiah, 2013).

Segregasi pembelajaran dalam pendidikan ada dua macam yaitu: 1) Segregasi *horizontal* yakni pemisahan pembelajaran dalam disiplin ilmu yang didominasi atau lebih dipilih oleh perempuan atau laki-laki; 2) Segregasi *vertikal* yakni pemisahan gender vertikal menggambarkan hierarki berbentuk piramida: semakin tinggi posisi, semakin sedikit perempuan-situasi sering divisualisasikan sebagai langit-langit kaca, yang sulit untuk menerobosan. Kedua segregasi vertikal dan horizontal berkontribusi dalam hal urutan jenis kelamin tertentu dalam sebuah lembaga pendidikan. Kedua segregasi vertikal dan horizontal berkontribusi dalam hal urutan jenis kelamin tertentu dalam sebuah lembaga pendidikan menjelaskan aspek diskriminasi gender terjadi secara “terselubung” di kalangan akademisi dan ilmu pengetahuan (Brief, 2007).

#### **2.4 Dasar Segregasi Kelas Berbasis Gender**

Dasar pemisahan kelas yaitu pemisahan/pengelompokan peserta didik, menurut William A Jeager dapat didasarkan kepada: a) Fungsi Integrasi, yaitu pemisahan atau pengelompokan yang didasarkan atas kesamaan-kesamaan yang ada pada peserta didik. Pemisahan atau pengelompokan ini didasarkan menurut jenis kelamin, umur dan sebagainya. Pengelompokan berdasarkan fungsi ini menghasilkan pembelajaran yang bersifat klasikal; b) Fungsi perbedaan, yaitu pemisahan pengelompokan peserta didik didasarkan kepada perbedaan-perbedaan yang ada dalam individu peserta didik, seperti minat, bakat, kemampuan dan sebagainya. Pemisahan atau pengelompokan berdasarkan fungsi ini menghasilkan pembelajaran individual (Barotut, 2016).

Pemisahan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya merupakan ajaran dari agama Islam. Pemisahan ini untuk menjaga keduanya dari perbuatan yang dilarang seperti zina. Apabila antara laki-laki dan perempuan tidak dipisah dikhawatirkan akan munculnya godaan-godaan hawa nafsu yaitu timbulnya syahwat diantara keduanya. Allah berfirman dalam surat An Nur ayat 30 dan Al Isra ayat 32 Artinya: *“katakan kepada orang laki-laki beriman: hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”*. Ayat diatas merupakan dasar dari dianjurkannya pemisahan antara laki-laki dan perempuan. Dikarenakan apabila mereka dicampur akan lebih mendekatkannya pada perbuatan yang buruk. Dimana dikhawatirkan akan menimbulkan syahwat diantara keduanya. Tujuan sistem pembelajaran terpisah diterapkan adalah karena perintah ajaran agama Islam yaitu untuk dapat menjaga pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga tidak akan adanya fitnah atau menimbulkan syahwat diantara keduanya. Selain itu, dari segi pendidikan bertujuan untuk memberikan tempat bagi peserta didik fokus dan konsentrasi dalam belajar (Ahmadi, 2015).

Beberapa alasan yang mendasari para praktisi dan akademisi pendidikan terhadap pentingnya segregasi kelas berbasis gender (*Single Sex Education*) tersebut, antara lain: a) agama dan budaya, dimana mengajarkan agar anak perempuan dipisahkan dari laki dalam hal apapun termasuk pendidikan; b) adanya keamanan, dimana perempuan dapat terhindar dari gangguan laki-laki, seperti hamil sebelum menikah, perkosaan, gangguan verbal maupun fisik; c) jarak, tempat tinggal yang jauh dari sekolah merupakan ancaman perempuan, oleh karena itu biasanya orang tua memilih sekolah dekat rumah atau jauh namun mencari sekolah berasrama khusus berdasarkan jenis kelamin; d) kinerja, prestasi perempuan menjadi lebih baik dalam mata pelajaran seperti matematika dan ilmu alam; e) mandiri, peserta didik perempuan menjadi lebih dewasa, matang dan menunjukkan perilaku pembelajaran yang lebih kooperatif; f) dinamika pembelajaran berkembang dengan baik, karena dalam sekolah campuran dinamika berjalan monoton selalu mendiskriminasi perempuan sehingga mereka lebih banyak diam; g) percaya diri, peserta didik perempuan lebih percaya diri dalam

mengeksplorasi potensi dan kemampuan akademisnya tanpa merasa malu terhadap lawan jenisnya (Wiratmo, 2008; Jackson, 2002).

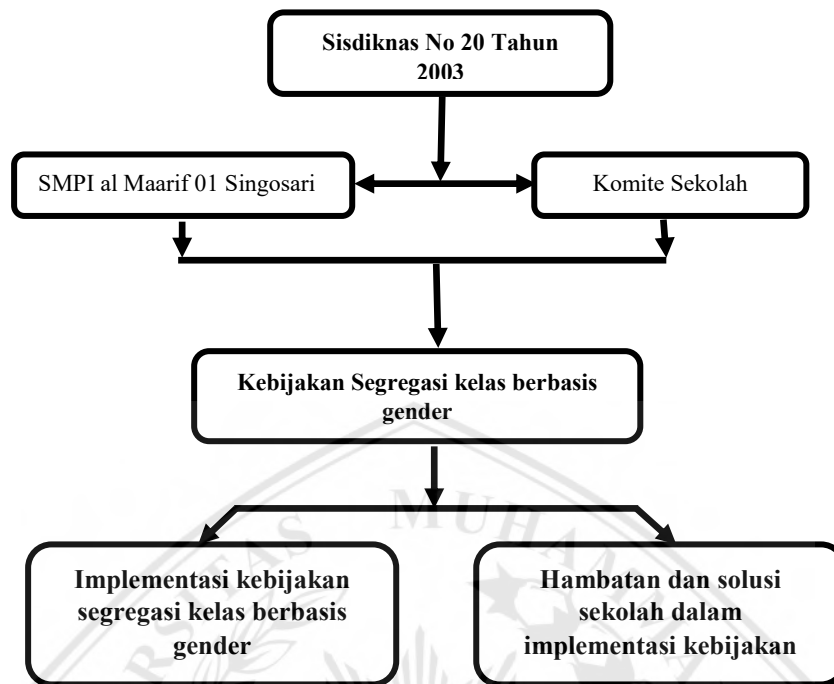
Penelitian lain oleh sekolah di Inggris didapatkan bahwa peserta didik putri yang belajar disekolah putri lebih cerdas dibandingkan dengan peserta didik disekolah campuran. Hasil tersebut berkaitan dengan perkembangan otak laki-laki dan perempuan pada usia 12-16 tahun yang berbeda, karena selama puber perkembangan otak perempuan lebih cepat dua tahun dari pada laki-laki. Perbedaan kemampuan ini juga mempengaruhi cara berinteraksi antar teman belajar dalam kelas. Pembagian kelas berdasarkan jenis kelamin sebagai teman belajar secara umum dapat berupa kelas putra, kelas putri, dan kelas campuran. Peserta didik dalam kelas putra sering bercanda dengan tujuan membuat diri mereka sebagai orang yang hebat dan cenderung berbicara terbuka pada teman belajarnya. Jadi interaksi antar anggota kelas putra juga lebih terbuka. Kelas putri memiliki interaksi yang baik dikarenakan kemampuan mereka dalam berkomunikasi terutama dengan sesamanya. Cara berkomunikasi inilah yang menjadikan suasana keakraban dalam kelas. Sedangkan peserta didik kelas campuran memiliki kecanggungan dalam berinteraksi karena kehadiran lawan jenis, kecanggungan ini karena timbulnya rasa malu dan adanya norma tertentu. Di Indonesia sendiri, perbedaan posisi antara laki-laki dan perempuan sangat besar dan masih dipandang sebagai penghambat terhadap proses belajar disekolah yang berlatar belakang agama, terutama agama Islam. Dan tidak menutup kemungkinan hal yang sama juga terjadi di sekolah umum (Vasyura, 2008).

## **2.5 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu oleh Investigasi Empiris Atas Prestasi Belajar Siswa Madrasah Aliyah Model *Single Sex Education* Dan *Coeducation* Di Kabupaten Ponorogo. Fokus penelitian ini membandingkan prestasi belajar sekolah yang berjenis terpisah dan campuran. Peserta didik MA Al-Mawaddah lebih kreatif dan mandiri dari MA Darul Huda. Sementara MA Darul Huda lebih kreatif dan mandiri dibanding MAN 2. Persepsi peserta didik terhadap pacar, semua siswa menganggap sebagai pengganggu. Namun bagi MA Darul Huda, pacar bukan saja mengganggu tetapi juga dapat melanggar agama dan merupakan perbuatan maksiyat (Muafiah, 2013).

Kebijakan segregasi gender dalam dunia pendidikan ini sangat penting untuk dikaji khususnya bagi sekolah yang berbasis Islam, agar dapat diketahui seberapa efektif penerapan kebijakan segregasi kelas berbasis gender (Ampera Dina, 2012). Begitu juga penelitian Yulianto (2013) studi perbandingan hasil belajar fisika sesaat kelas putra, kelas putri, dan kelas campuran pada materi getaran di SMAN 1 kradenan kabupaten grobogan menyimpulkan bahwa hasil belajar ketiga kelas tidak jauh berbeda. Faktor interaksi antar individu dalam kelas campuran yang mempengaruhi hal tersebut. Adanya lawan jenis dalam kelas campuran membuat peserta didik terkena dampak negatif dalam emosi dan perilaku meskipun tidak semuanya. Ada sebagian peserta didik justru bersemangat dengan adanya lawan jenis. Sesuai dengan hasil penemuan Reni dan Parker tentang adanya persaingan positif yang terjadi antara peserta didik putra dan peserta didik putri dalam kelas campuran, serta peran peserta didik putri sebagai pengendali perilaku negatif peserta didik putra. Interaksi dalam kelas sejenis baik kelas putra maupun kelas putri berjalan kurang baik. Karena kelas-kelas tersebut dibentuk dari kelas campuran yang terdiri dari teman dengan jenis kelamin berbeda dan cara berinteraksi yang berbeda pula. Kebiasaan yang dilakukan di kelas sebelumnya masih dilakukan. (Yulianto, 2013).

## 2.6 Kerangka Berpikir



Bagan 2.6.1 Kerangka Berpikir Kebijakan segregasi kelas berbasis gender

Setiap tingkat satuan pendidikan perlu adanya suatu kebijakan dalam mencapai visi dan misi sekolah. Agar visi dan misi sekolah terwujud maka sekolah menerapkan suatu kebijakan segregasi kelas berbasis gender yang merupakan upaya sekolah untuk membiasakan peserta didik dalam bergaul dengan lawan jenis, dan salah satu upaya pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang pasal 1 ayat 1 No.20 Tahun 2003 yaitu menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan undang-undang tersebut akan menjadi acuan kepala sekolah bersama komite mengeluarkan kebijakan segregasi kelas berbasis gender dalam mencapai visi misi sekolah.

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif, metode kualitatif merupakan studi yang mendalam menggunakan teknik pengumpulan data langsung dari orang dalam lingkungan alamiahnya (Lexy J, 2011). Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan

penelitiannya berdasarkan keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi tiga aspek yaitu: 1) Tempat (SMPI al Maarif 01 singosari) sebagai sekolah yang menerapkan kebijakan segregasi kelas berbasis gender; 2) Pelaku, merupakan komponen pelaksana meliputi Kepala Sekolah, wakil kepala sekolah bagian kepeserta didikan, Guru beserta komponen lain yang terlibat; 3) Aktifitas (komponen pelaksana dalam menjalankan kebijakan) yang berinteraksi secara sinergis. Landasan teori akan difungsikan sebagai bekal untuk memahami konteks sosial secara lebih luas dan mendalam.

### **3.2 Lokasi Penelitian Dan Subyek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di SMPI al-Maarif 01 terletak di wilayah Singosari kabupaten Malang, sebagai sekolah yang menerapkan kebijakan segregasi kelas berbasis gender . Data diambil dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan subyek penelitian adalah: 1) Kepala Sekolah; 2) Guru; 3) Peserta didik dan Sisw ; dan 4) Wali peserta didik SMPI al Maarif 01 Singosari. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Segregasi Gender di SMPI al Maarif 01 Singosari.

### **3.3 Data Dan Sumber Data**

Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif sumber data utamanya adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Lexy J, 2014). Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang merupakan sumber data dan diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dari informan pertama, yaitu: 1) Kepala Sekolah, 2) Guru; 3) Peserta didik laki-laki dan perempuan, 4) Wali orang tua peserta didik SMPI al-Maarif 01. Data ini dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diperoleh dengan melakukan wawancara. Hasil wawancara tersebut dapat diperjelas melalui data sekunder adalah data-data yang lain, yang terdapat dalam buku-buku atau dokumen lain yang secara tidak langsung berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh informasi sesuai dengan rumusan masalah maka dilakukan teknik pengumpulan data yaitu: (1) Observasi; (2) Wawancara; dan (3) Dokumentasi. Teknik yang ada kemudian dibuat lembar instrumen penelitian

yang meliputi: 1) Lembar Observasi, dengan maksud peneliti ingin mengamati peristiwa atau aktivitas mengenai bentuk dan pelaksanaan kebijakan segregasi kelas berbasis gender; 2) Pedoman wawancara, dengan maksud untuk menggali lebih mendalam dari beberapa informan mengenai bagaimana kebijakan segregasi kelas berbasis gender diimplementasikan, 3) Studi Dokumen, dengan maksud peneliti ingin mengetahui isi dokumen tentang implementasi kebijakan segregasi kelas berbasis gender serta prosedur pelaksanaannya.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini mempunyai empat pangkal kegiatan berdasarkan Milles & Huberman yaitu sebagai berikut: 1) Pengumpulan data, yang meliputi wawancara, observasi dan studi dokumen, 2) Reduksi data, merupakan proses pemilahan data wawancara observasi dan studi dokumen sesuai dengan peruntukannya, 3) Penyajian data dilakukan setelah reduksi data selesai, kemudian dibuat laporan hasil penelitian, 4) Verifikasi data/menarik kesimpulan berdasarkan hasil temuan penelitian. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Keempat siklus di atas, semuanya harus berjalan secara seimbang sehingga dalam penarikan kesimpulan tidak terjadi kekurangan. Apabila dalam penarikan kesimpulan terdapat kekurangan maka dapat dicari data kembali di dalam lapangan oleh peneliti (Lexy J, 2014; Sugiyono, 2005).

### **3.6 Pengujian Keabsahan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data triangulasi. Teknik triangulasi berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Lexy J, 2011; Sugiyono, 2005). Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data dengan mengkombinasikan triangulasi metode dan triangulasi sumber menurut Norman K. Denkin dalam Rahardjo (2010). Pada bagian ini peneliti mengecek data mengenai implementasi kebijakan segregasi kelas berbasis gender dan perbandingan data dapat ditempuh sebagai berikut: 1) Membandingkan data hasil wawancara dengan hasil observasi serta dokumen pendukung; 2) Membandingkan data hasil wawancara beberapa responden dengan responden lainnya.



#### **4. HASIL PENELITIAN**

##### **4.1 Implementasi Kebijakan Segregasi Di SMP Islam Al-Maarif 01 Singosari**

Pada bagian ini, peneliti memaparkan hasil temuan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai responden mengenai implementasi kebijakan segregasi kelas berbasis gender di SMPI al Maarif 01 Singosari yang dideskripsikan sebagai berikut:

###### **4.1.1 Komunikasi**

Komunikasi pada implementasi kebijakan segregasi kelas berbasis gender di SMPI al Maarif yang dilakukan kepala sekolah berupa sosialisasi. Kepala sekolah melakukan sosialisasi kepada seluruh dewan guru di SMPI al Maarif dengan cara memberikan sosialisasi kepada setiap perwakilan dari struktur organisasi tata tertib untuk memberikan tugas baru terkait perencanaan kebijakan seperti struktur organisasi sarpras untuk menyediakan segala alat dalam mendukung kebijakan segregasi kelas berbasis kelas, dan dewan guru. Ini artinya kepala sekolah melakukan sosialisasi berupa rencana-rencana setiap struktur organisasi di sekolah dengan tujuan agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan lancar. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dan observasi oleh informan:

Sebelum tahun ajaran baru 2017 kepala sekolah beserta dewan guru membuat rancangan tugas-tugas dalam rapat perencanaan kebijakan segregasi kelas berbasis gender sebagai pendukung kebijakan implementasi nantinya. Kemudian saat sosialisasi sukses kepada seluruh dewan guru, wali murid peserta didik, dan kepada masyarakat. Kepala sekolah secara langsung menetapkan kebijakan baru yaitu pemisahan kelas dan diimplmentasikan pada tahun ajaran baru 2017 (W. KS. 08 Maret 2018).

Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh kepala sekolah yaitu penyampaian informasi mengenai tugas wewenang dalam implementasi kebijakan segregasi kelas berbasis gender yang akan dilakukan kepada semua dewan guru agar setiap pihak yang terlibat memahami tugas dan tanggung jawabnya sehingga dalam pelaksanaan tidak menimbulkan kesalahan. Hal ini sejalan dengan informan lain bahwa:

Pertama yang dilakukan kepala sekolah yaitu membuat rencana tugas wewenang setiap struktur organisasi seperti kepala tata usaha, kesiswaan, kurikulum bendahara, humas, dan sarpras. Seperti halnya dari struktur

organisasi tata tertib di perintahkan untuk membuat aturan peserta didik laki-laki lebih diberi ketegasan dalam hal tindakan, kemudian dari struktur organisasi sarpras menyediakan anggaran untuk tambahan cctv keamanan di setiap kelas (W. Sarpras. 19 Mei 2018).

Beberapa wali murid peserta didik mengatakan bahwa informasi terkait kebijakan implelementasi segregasi gender mengetahui dari guru piket ketika pendaftaran peserta didik baru bahwa di SMPI peserta didik laki-laki dan perempuan kelasnya dipisah. Wali murid peserta didik tersebut sangat setuju jika ada kebijakan segregasi kelas berbasis gender di SMPI al Maarif ini, karena sebagai orang tua sangat khawatir terhadap pergaulan anak-anak jaman sekarang, dengan hal tersebut orang tua tidak merasa khawatir ketika mereka ada kegiatan diluar rumah seperti disekolah. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara oleh informan yaitu:

Salah satu perwakilan wali murid peserta didik mengutarakan bahwa dirinya sangat menyetujui adanya kebijakan segregasi kelas berbasis gender di sekolah. Alasannya, dengan adanya kebijakan tersebut sebagai orang tua peserta didik merasa tenang dan tidak khawatir ketika anak belajar diluar rumah (W. WM. 10 Maret 2018).

Waktu pelaksanaan kebijakan segrgeasi gender mulai diberlakukan pada tahun ajaran baru 2017 dan bersamaan kepala sekolah SMPI al Maarif 01 Singosari baru menjabat sebagai kepala sekolah artinya kebijakan segregasi kelas berbasis gender di SMPI al Maarif tersebut baru dilaksanakan satu tahun. Kebijakan segregasi kelas berbasis gender berlaku terhadap peserta didik selama kegiatan disekolah dengan tujuan untuk mengendalikan peserta didik ketika bergaul dengan lawan jenis dan ketika peserta didik berada diluar jam pelajaran untuk memantau aktivitas peserta didik. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara oleh informan:

Kebijakan segregasi kelas berbasis gender di implementasikan pada tahun ajaran baru 2017, pada saat kepala sekolah baru menjabat sebagai kepala sekolah di SMPI al Maarif dan kebijakan itu diberlakukan hanya bagi peserta didik dan semua guru tetap jadi satu tempat guru laki-laki maupun perempuan dan pengajarnya guru laki-laki diperbolehkan mengajar peserta didik perempuan begitu juga sebaliknya alasannya karena terkendala dengan kurangnya guru laki-laki di SMPI al Maarif (W. KS. 08 Maret 2018).

Hal ini sejalan dengan informan lainnya yang menyatakan bahwa: Kepala sekolah baru menjabat selama dua tahun tetapi di tahun pertama selama kepemimpinan kebijakan segregasi gender belum diterapkan akan tetapi di

tahun kedua yaitu tahun ajaran baru yaitu tahun 2017. Baru di implementasikan kebijakan segregasi kelas berbasis gender (W. KTU. 21 Mei 2018).

Bedasarkan uraian diatas artinya tujuan dari kebijakan segregasi tersebut salah satu upaya untuk mengawasi peserta didik SMPI al Maarif selama kegiatan sekolah berlangsung seperti jam istirahat guru tidak bisa mengawasi secara terus menerus pada saat diluar jam pelajaran. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara informan :

Guru tidak bisa mengawasi secara terus menerus di sekolah ketika diluar jam belajar, maka pihak yayasan dan sekolah sepakat, pada ajaran baru 2017 di implementasikan kebijakan segregasi kelas berbasis gender. Tujuannya, agar anak-anak tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti pacaran, pelecehan misalnya anak laki-laki suka mengganggu terhadap peserta didik perempuan (W.WK. 03 Maret 2018).

#### **4.1.2 Sumber Daya**

Sumber daya utama yang pertama dalam implementasi suatu kebijakan adalah fasilitas fisik yang merupakan faktor penting dalam implementasi segregasi kelas berbasis gender SMPI al Maarif 01 Singosari. Fasilitas yang ada disekolah dalam pelaksanaan kebijakan segregasi gender berbasis kelas secara keseluruhan sudah mencukupi walaupun ada beberapa yang kurang memadai keberlangsungan kebijakan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara yaitu:

Secara keseluruhan fasilitas yang ada di sekolah cukup untuk menunjang implementasi kebijakan segregasi kelas berbasis gender walaupun ada beberapa fasilitas yang kurang menunjang terlaksana kebijakan alasannya tidak seimbangnya jumlah peserta didik dan ruangan yang ada disekolah (W.WK. 03 Maret 2018).

Hal ini sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil observasi didukung dengan studi dokumen bahwa sumber daya fasilitas yang ada di sekolah yaitu terdiri dari satu kantor dan dua gedung terdiri dari 3 lantai yaitu lantai dasar, gedung bagian kanan untuk laki-laki dan gedung bagian kiri untuk perempuan. Jumlah seluruh kelas ada 24 kelas masing-masing 8 kelas untuk kelas VII, VIII, dan IX, 4 untuk laki-laki dan 4 untuk perempuan. Dalam satu sekolah terdapat tiga kantin yaitu lantai dua dan dua dilantai dasar untuk kantin koperasi.

Kedua, sumber daya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan segregasi kelas berbasis gender secara umum sudah terlaksana dengan baik dan sesuai

dengan apa yang ditugaskan kepala sekolah, pada saat sosialisai kepada dewan guru, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan responden yaitu:

Struktur organisasi tata tertib di perintahkan untuk membuat aturan peserta didik laki-laki lebih diberi ketegasan dalam hal tindakan, struktur organisasi kebersihan ditugaskan untuk memantau peserta didik laki-laki dan perempuan ketika menuju kegiatan sholat dimasjid (W. Sarpras.18 Mei 2018).

Tambahan tugas bagi koordinasi bimbingan konseling yaitu dua guru laki-laki dominan kepada peserta didik laki-laki, dan satu guru perempuan lebih dominan pada peserta didik perempuan (W. GBK. 18 Mei 2018).

Ketiga, sumber daya finansial pada saat mengimplementasikan kebijakan segregasi kelas berbasis gender keuangan cukup menunjang untuk berlangsungnya kebijakn segregasi kelas berbasis gender dan secara kebetulan ada bantuan dari bebrapa wali murid peserta didik, hal itu sangat membantu sekolah dalam melengkapi sarana prasarana yang kurang seperti tidak adanya cctv diruang kelas pada saat itu. hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informan yaitu:

Pada saat diimplementasi kebijakan segregasi kelas berbasis gender secara finansial sekolah kesulitan, karena tidak adanya cctv untuk menunjang pengawasan diikelas pada saat jam pelajaran kosong dan waktu istirahat, akan tetapi terbantu oleh pemeberian bantuan dari wali peserta didik berupa cctv untuk dipasang disetiap kelas (W. Sarpras, 18 Mei 2018).

#### **4.1.3 Disposisi**

Disposisi atau sikap pelaksana terhadap implementasi kebijakan, setelah sekolah menerapkan kebijakan segregasi kelas berbasis gender. Sikap pelaksana terdiri dari, kepala sekolah, dewan, guru, dan peserta didik. Beberapa tenaga pendidik tersebut, dapat dikatakan sikap kebijakan segregasi kelas berbasis gender. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dan observasi terhadap informan:

Disposisi atau sikap pada tenaga pendidik yaitu sikap dari guru-guru di SMPI al Maarif Singosari terhadap adanya kebijakan segregasi kelas berbasis gender, dari sikap ditunjukkan kepala sekolah sudah terlihat ketika membuat perencanaan tugas pada setiap struktur organisasi seperti guru bimbingan konseling untuk menambah tiga koordinator laki-laki dan perempuan untuk melayani peserta didik sesuai gender peserta didik. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan:

Ketika implementasi kebijakan segregasi kelas berbasis gender sebagai guru BK, justru lebih mudah mulai koordinasi dan proses pembinaannya terutama.

Karena ketika proses pembinaan sesama laki-laki itu lebih maksimal dan mudah dan begitu sebaliknya (W.GTT. 25 Mei. 2018).

Selain informan di atas, peneliti juga mewawancarai beberapa perwakilan peserta didik tentang reaksi mereka, setelah sekolah menerapkan kebijakan segregasi kelas berbasis gender dan tata tertibnya.

Salah satu perwakilan peserta didik laki-laki mengutarakan bahwa dirinya kurang menyetujui adanya kebijakan segregasi kelas berbasis gender alasannya semangat belajar jadi tidak ada lagi, tidak seperti dulu ketika digabung kami selalu semangat ketika ada teman perempuan dikelas, jadi kami kurang setuju dengan adanya kebijakan segregasi kelas berbasis gender tersebut (W. SL. 25 April 2017).

Sebagian peserta didik justru sangat senang alasannya bisa meningkatkan prestasi jika dipisah, karena tidak ada saingan dikelas dan peserta didik tersebut lebih konsentrasi waktu pelajaran. Akan tetapi kebanyakan peserta didik laki-laki kurang setuju karena tidak bisa lihat perempuan (W. SL. 25 April 2017).

Dan Sebagian peserta didik perempuan merasakan kenyamanan saat berada dikelas waktu jam pelajaran alasannya tidak ada yang mengganggu waktu jam pelajaran dan juga lebih percaya diri dan fokus dalam menuangkan pendapat didepan kelas (W. SP. 25 April 2017).

#### **4.1.4 Struktur Birokrasi**

Ketentuan dan aturan kebijakan dapat dijalankan oleh semua dewan guru dengan melaksanakan kebijakan sesuai dengan prosedur yang ada. Peserta didik sebagai objek dari kebijakan segregasi kelas berbasis gender dan guru sebagai aparatur, administrator dan birokrat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh sekolah SMPI al Maarif.

Berdasarkan hasil wawancara dan didukung dengan studi dokumen, adapun prosedur pelaksanaan dalam mengimplementasikan kebijakan segregasi kelas berbasis gender sesuai dokumen pelaksanaan kebijakan antara lain: a) Seluruh guru memegang daftar tata tertib peserta didik, b) Seluruh guru mendapat giliran jadwal piket harian, lantai satu, dua dan tiga, c) Petugas kebersihan untuk mengawasi peserta didik menuju masjid, c) Peserta didik laki-laki dilarang memasuki kelas perempuan begitu juga sebaliknya. Guru yang menemukan peserta didik melakukan pelanggaran, maka guru wajib memerintahkan peserta didik yang bersangkutan untuk mengisi dan menandatangani blangko pelanggaran peserta didik di ruang BK; d) Guru BK selanjutnya melaporkan kepada wali kelas

dan wakil kepala sekolah bagian kepeserta didik, serta kepala sekolah guna memberikan penilaian terhadap pelanggaran peserta didik.

Salah satu informan memaparkan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan segregasi kelas berbasis gender diawali dari guru yang akan diberikan tugas dari kepala sekolah dalam membuat perencanaan setiap struktur organisasi untuk menunjang keberhasilan administrasi maupun kegiatan setiap harinya. Seperti pembagian koordinasi pada bimbingan konseling, jadwal piket yang ditugaskan pada seluruh guru secara bergilir untuk mengawasi peserta didik dan melayani aktivitas sekolah, pengawasan pada saat jam sholat dialihkan kepada pegawai kebersihan untuk mengawasi peserta didik (W.GBK.25Mei 2018).

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informan bahwa, ada beberapa konselor yang bertugas dan bertanggung jawab memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik, koordinator laki-laki bertanggung jawab pada peserta didik laki-laki dan koordinator perempuan pada peserta didik perempuan. Tujuannya agar lebih mudah dalam proses pembinaan (W. Sarpras, 18 Mei 2018).

#### **4.2 Faktor Penghambat Dan Solusi Yang Dihadapai Sekolah Pada Implementasi Kebijakan Segregasi Kelas Berbasis Gender**

Pelaksanaan suatu kebijakan pendidikan di lembaga sekolah, tentunya tidak terlepas dari sebuah hambatan ataupun permasalahan yang harus dihadapi. Permasalahan biasanya muncul dalam setiap pelaksanaan kebijakan yang akan mengganggu keterlaksanaan suatu program kebijakan, sehingga perlu dilakukan tindak lanjut penyelesaian dari permasalahan yang timbul.

Berdasarkan hasil observasi pelaksanaan kebijakan segregasi kelas berbasis gender di SMPI al Maarif Singosari menghadapi beberapa masalah dalam pelaksanaannya. Pertama, tidak seimbang tenaga guru yaitu guru perempuan lebih banyak dari pada guru laki-laki pada saat itu keadaan peserta didik laki-laki lebih banyak dari pada peserta didik perempuan dan selama membutuhkan tenaga pendidik laki-laki, pelamar kerjanya mayoritas masih banyak perempuannya karena penerimaan tenaga pendidik harus melalui kantor yayasan al Maarif. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan informan yaitu:

Permasalahan terkait sumber daya manusia diantaranya, kuantitas laki-laki lebih banyak dari pada perempuan, dan guru lebih banyak perempuan dari pada laki-laki artinya disini tidak seimbang, kemudian kendala lainnya yaitu, mayoritas pelamar kerja di kantor yayasan adalah perempuan sehingga sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan tidak sesuai dengan mekanisme sekolah (W. Sarpras. 18. Mei 2018).

Kedua, ruangan untuk kelas laki-laki kelebihan karena ruangan kelas di sekolah dibuat maksimal 40 peserta didik karena adanya pembagian kelas itu maka ada kelebihan dominan peserta didik laki-laki. Maka hal tersebut membuat sebagian guru sulit mengendalikan peserta didik ketika jam pelajaran berlangsung. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan yaitu:

Kelas laki-laki melebihi kapasitas ruang, kelas yang maksimal hanya menampung 40 peserta didik, maka hal tersebut membuat guru-guru berinisiatif untuk menjadikan mikrofon sebagai alat bantu dalam menyampaikan pelajaran dikelas (W. Sarpras. 18 Mei, 2018).

Hal ini sesuai dengan informan lain yang menyatakan bahwa dengan lebih banyaknya kelas laki-laki dikelas membuat suasana kelas menjadi tidak kondusif yaitu Suasana kelas sulit dikendalikan. Dikelas seringkali membuat keramaian sehingga suasana belajar kelas tidak kondusif (W.KS. 03 Maret 2017).

Ketiga, peserta didik laki-laki lebih cenderung tidak bisa menerima kebijakan tersebut alasan mereka karena tidak bisa berinteraksi dengan peserta didik perempuan sehingga membuat mereka tidak semangat sekolah dan cenderung membuat suasana kelas kurang kondusif ketika jam pelajaran berlangsung. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan informan lain bahwasannya:

Berkaitan dengan sikap peserta didik ketika awal di implementasikan khususnya kelas VIII dan IX sering melakukan aksi demo kepada kepala sekolahnya karena adanya kebijakan segregasi kelas berbasis gender (W.KS. 03 Maret. 2018).

Hal lain sejalan dengan informan lain bahwa ada sebagian guru yang mengatakan jika peserta didik laki-laki sulit dikendalikan ketika jam pelajaran berlangsung. Hal ini sesuai dengan beberapa pernyataan responden yang menyatakan bahwa:

Beberapa guru berpendapat bahwa dikelas laki-laki kurang kondusif ketika jam pelajaran berlangsung, karena peserta didik laki-laki kekompatannya akan semakin erat jika bersama dengan laki-laki dikelas akan tetapi tidak setiap waktu, hanya beberapa guru yang berpendapat seperti itu dan tergantung dari cara guru itu dalam menyampaikan pelajaran (W.GBK. 03 Maret 2017).

Hal ini didukung oleh responden lain bahwa peserta didik putra pelanggan paling sering setelah dilaksanakan kebijakan segregasi kelas berbasis gender yaitu membully teman sehingga membuat suasana kelas menjadi kurang kondusif khususnya dikelas laki-laki. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan bahwa:

Setelah adanya kebijakan segregasi kelas berbasis gender pelanggran peserta didik yang sering dilakukan adalah pelanggaran bullying. Untuk masalah-masalah asusila lebih menurun setelah adanya kebijakan tersebut dibanding sebelum adanya kebijakan segregasi kelas berbasis gender (W. GT. 25 April 2017).

Beberapa solusi telah dilakukan sekolah untuk mengatasi masalah yang terjadi seperti: Pertama, usulan dewan guru untuk menggunakan mic sebagai media dalam menyampaikan pelajaran khusus kelas laki-laki. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan bahwa:

Beberapa Dewan pengajar mengusulkan mikrofon digunakan sebagai media pembelajaran khusus laki-laki karena jumlahnya lebih banyak yang laki-laki tujuannya untuk memaksimalkan ketika menyampaikan pelajaran dikelas (W.Sarpras. 28 Mei 2018).

Kedua, rencana tahun ajaran baru selanjutnya untuk membatasi jumlah penerimaan peserta didik yaitu maksimal 240 peserta didik 120 peserta didik perempuan dan 120 peserta didik laki-laki, karena disesuaikan dengan jumlah kelas yang ada. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan bahwa:

Kedua solusinya dipenerimaan peserta didik lebih di seimbangkan dengan (rombel) rombongan belajar yaitu penerimaan jumlah peserta didik total 240 masing-masing 120 untuk 24 ruang kelas untuk menyeimbangkan jumlah peserta didik perkelasnya (W. KTU. 28 Mei 2018).

Ketiga, pendekatan dan pembinaan secara terus menerus terhadap peserta didik yang tidak berkenan dengan kebijakan tersebut terutama peserta didik laki-laki. Hal ini sesuai dengan yang dipaparkan informan sebagai berikut:

Masalah peserta didik yang cenderung tidak terima dengan adanya kebijakan tersebut, kepala sekolah terus melakukan pendekatan-pendekatan dibentuk pemahaman dengan mendatangi setiap kelas untuk memberi pemahaman kepada seluruh peserta didik SMPI al Maarif 01 singosari (W. KS. 08 Maret 2018).

Hal lain juga dipaparkan oleh informan lain, bahwa setiap ada pelanggaran maka dikenakan poin jika poin tersebut melebihi batas maksimum yaitu 50 poin maka ada tindakan yaitu pembinaan terhadap peserta didik tersebut. Hal ini sesuai dengan wawancara responden berikut ini:

Pelanggaran seperti pelanggran membully maupun terlambat, mereka akan dipanggil lalu ada pembinaan oleh guru dengan pemberian sanksi yang bersifat mendidik, dan pihak sekolah mencoba mendatangi rumah peserta didik dan memberikan pengarahan kepada wali peserta didik (W. GBK. 08. Maret. 2018).



Beberapa solusi yang telah dilakukan sekolah merupakan suatu upaya agar suatu aturan dalam kebijakan segregasi kelas berbasis gender dapat terlaksana dengan baik, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Kebijakan segregasi kelas berbasis gender yang telah dijalankan sekolah sudah berjalan dengan baik, meskipun ada beberapa kendala dalam menjalankannya, akan tetapi secara perlahan permasalahan tersebut dapat diatasi melalui solusi yang dilakukan pihak sekolah.

## **5. PEMBAHASAN**

### **5.1 Implementasi Kebijakan Segregasi Kelas Berbasis Gender Di SMP Islam Al Maarif 01 Singosari**

Implementasi kebijakan pendidikan sangat penting karena dengan suatu kebijakan akan mengarahkan suatu tujuan pendidikan dapat tercapai (Leo, 2006). Implementasi kebijakan segregasi kelas berbasis gender diimplementasikan di SMPI al Maarif Singosari untuk mencapai visi misi sekolah yaitu dengan terwujudnya peserta didik yang bertaqwa, disiplin, semangat, memiliki daya juang, cerdas, kreatif, terampil, dan berakhlakul karimah. Kebijakan segregasi kelas berbasis gender merupakan aturan yang berlandaskan pada agama. Dalam Islam laki-laki dan perempuan merupakan dua jenis yang akan menimbulkan syahwat bila saling memiliki pandangan khusus keduanya, sehingga keseringan bertatap muka antara laki-laki dan perempuan dihindari dengan sistem segregasi kelas berbasis gender. Jika ditinjau dari sisi negatifnya akan terjadinya daya pandang yang menimbulkan syahwat, segregasi kelas berbasis sangat tepat diterapkan, jika ditinjau dari segi positifnya (Rohmah, 2008).

Model implementasi kebijakan yaitu model George C Edwards III, model implementasi kebijakan ini berperspektif *top down*. Menurutny terdiri atas empat variabel yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penelitian ini peneliti dapat menjelaskan variabel variabel implementasi kebijakan yaitu:

#### **5.1.1 Komunikasi**

Untuk menuju implementasi kebijakan yang diinginkan, maka pelaksana harus mengerti benar apa yang harus dilakukan untuk kebijakan tersebut. Selain itu yang menjadi sasaran kebijakan harus di informasikan mengenai kebijakan yang akan

diterapkan mulai dari tujuan dan sasarannya. Maka dari itu sosialisasi kebijakan sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan dari implementasi kebijakan. Sosialisasi bisa dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan media masa, elektronik, sosial dll (Subarsono, 2011).

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemangku kebijakan, sudah seharusnya memberikan informasi kepada seluruh warga SMPI al Maarif 01 singoisari terkait kebijakan segregasi kelas berbasis gender dan mengarahkan tugas-tugas setiap struktur organisasi sekolah untuk memfasilitasi dalam pengembangan peserta didik. Kepala sekolah SMPI al MAarif 01 Singosari membuat kebijakan segregasi kelas berbasis gender dengan melihat semua sisi manfaat dan kelemahan yang ada, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

Hal ini sesuai dengan teori Edward III bahwa kebijakan hendaknya tidak hanya disampaikan kepada para pelaksana namun juga dikomunikasikan dengan semua pihak yang menjadi kelompok sasaran dan pihak lain yang berkepentingan begitu juga dengan maksud, tujuan, dan isi kebijakan harus jelas. Koordinasi antara Kepala Sekolah dan bawahannya secara keseluruhan sudah terlaksana dan semua terlibat di dalamnya.

#### **5.1.2 Sumber Daya**

Keberadaan sumber daya pendukung akan sangat mempengaruhi ketercapaian tujuan kebijakan. Pemanfaatan sumber daya pendukung sesuai dengan manajemen pendidikan akan menjadi salah satu penunjang ketercapaian suatu tujuan pendidikan (Maimunah, 2014). Keberadaan sumber daya pendukung di SMPI al Maarif 01 Singosari mengalami keterbatasan secara infrastruktur maupun sumber daya manusianya. Keterbatasan sumber daya pendukung yang dimiliki sekolah menyebabkan dalam pelaksanaa kebijakan tersebut belum terlaksana maksimal. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Karaffillis (2016), bahwasannya keberadaan infrastruktur sekolah dan minimnya lahan menjadi penyebab timbulnya gangguan disekolah selain kurangnya tenaga guru laki-laki.

Kebijakan segregasi kelas berbasis gender dilaksanakan dalam satu gedung akan tetapi hanya ruang pembelajarannya dipisah antara peserta didik laki-laki dan perempuannya. Hal tersebut sesuai dengan model *Single sex Education* (SSE), yakni model sekolah yang proses pembelajarannya dilakukan secara terpisah

antara peserta didik laki-laki dan perempuan. Pemisahan tersebut struktur organisasi sekolahnya atau hanya pemisahan ruang belajarnya, kegiatan selain belajar dikelas masih bergabung antara peserta didik laki-laki dengan perempuan. Sekolah model ini biasanya diterapkan pada sekolah yang berada di lingkungan pendidikan yang didirikan oleh lembaga agama (Budiastuti Wiratmo & Mochamad, 2008). Pemisahan antara peserta didik laki-laki dan peserta didik perempuan penempatan dilakukan berdasarkan program atau jurusan yang diminati peserta didik, yang tentunya dilakukan tes penjurusan, untuk selanjutnya menentukan pembagian kelas untuk peserta didik laki-laki dan perempuan.

Masuk dalam lingkup kegiatan yang dilaksanakan diluar kelas serta diluar jam pelajaran yaitu ekstrakurikuler, terdapat beberapa yang berada dibawah naungan organisasi intra sekolah di SMPI al Maarif. Dalam proses pelaksanaannya dijelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan secara bersama tidak terpisah antara peserta didik laki-laki dan perempuan dan diampu oleh pembina setiap struktur organisasi kegiatan hal dikarenakan sekolah, sekolah melihat jumlah peminat yang tidak seimbang, maka hal tersebut tidak dipisah. Hal ini termasuk. Secara keseluruhan sarana dan prasana cukup memadai untuk menunjang berlangsungnya implementasi kebijakan segregasi kelas berbasis gender. Hal ini termasuk model segregasi tidak penuh, yakni model sekolah yang pemisahannya hanya terletak pada kelas pembelajarannya, sementara struktur organisasi sekolah dan yayasan masih menjadi satu (Kreitz-Sandberg, 2013).

### **5.1.3 Disposisi**

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan (Leo, 2006). Disposisi atau sikap pelaksana dari implementasi kebijakan segregasi kelas berbasis gender di SMPI al Maarif dalam penelitian ini membahas bagaimana sikap kepala sekolah, guru, maupun peserta didik seperti antusias, respon dan dukungan dari sekolah SMPI al Maarif yang menjadi tolok ukur keberhasilan kebijakan.

Sikap para pelaksana kebijakan segregasi kelas berbasis gender yaitu peserta didik perempuan sangat setuju dengan adanya kebijakan tersebut, karena peserta

didik merasa lebih fokus ketika tidak satu kelas dengan laki-laki, begitupun dengan laki-laki mereka merasa lebih bisa mengeksplorasi pengetahuannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa pemisahan kelas ini akan memberikan kenyamanan dan terbentuknya suasana kondusif di dalam kelas. Akan muncul keleluasaan pada peserta didik untuk mengekspresikan dirinya dalam seluruh aspek pembelajaran, termasuk pembelajaran dalam hal diskusi dikelas (Wiratmo, 2008; Jackson, 2002).

Pembelajaran akan lebih efektif dan efisien ketika kelas laki-laki dan perempuan dipisah (Ahmadi, 2015). Peserta didik akan memiliki rasa percaya diri yang tinggi untuk menjawab pertanyaan, diskusi, dan berkomunikasi. Usai guru menerangkan, peserta didik dapat merespon dengan cepat karena tidak malu atau canggung di kelas. Guru tidak membutuhkan waktu yang lama menunggu peserta didik agar mengemukakan pendapatnya. Kebanyakan peserta didik malu untuk berbicara karena takut salah selain itu, masa-masa puber yang dialami remaja seusia sekolah menengah pertama (SMP) memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis sehingga di dalam kelas peserta didik menjadi tidak konsentrasi karena harus menjaga sikap atau lebih pemalu yang cenderung mengarah pada proteksi diri berlebihan. Hal ini sesuai dengan penelitian lain oleh sekolah di Inggris didapatkan bahwa peserta didik putri yang belajar disekolah putri lebih cerdas dibandingkan dengan peserta didik disekolah campuran (Rennie, 1997). Adapun kesesuaian dengan penelitian terdahulu yaitu adanya lawan jenis dalam kelas campuran membuat peserta didik terkena dampak negative dalam emosi dan perilaku meskipun tidak semuanya (Yulianto, 2013).

Selama penerapan kebijakan segregasi kelas berbasis gender, ada perubahan sikap yang lebih baik berdasarkan dari hasil wawancara dengan guru bimbingan konseling. Hal tersebut dilihat dari catatan pelanggaran asusila khususnya yang dilakukan oleh peserta didik lebih menurun dibandingkan sebelum adanya kebijakan segregasi kelas berbasis gender. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan beberapa peneliti bahwa alasan yang mendasari para praktisi dan akademisi pendidikan terhadap pentingnya segregasi kelas berbasis gender (*Single Sex Education*) tersebut, antara lain: 1) Adanya keamanan, dan penegndalian diri bagi peserta didik agar tidak berbuat asusila seperti dimana perempuan dapat

terhindar dari gangguan laki-laki 2) Kinerja, prestasi perempuan menjadi lebih baik dalam mata pelajaran seperti matematika dan ilmu alam; 3) Dinamika pembelajaran berkembang dengan baik, karena dalam sekolah campuran dinamika berjalan monoton selalu mendiskriminasi perempuan sehingga mereka lebih banyak diam; g) Percaya diri, peserta didik perempuan lebih percaya diri dalam mengeksplorasi potensi dan kemampuan akademisnya tanpa merasa malu terhadap lawan jenisnya (Wiratmo, 2008; Jackson, 2002).

Adanya perubahan terhadap sikap peserta didik mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan sudah cukup berhasil menekan jumlah pelanggaran tata tertib dengan segala keterbatasan yang dihadapi sekolah. Segregasi kelas berbasis sangat tepat diterapkan, jika ditinjau dari segi positifnya. (Rohmah, 2008).

Hal ini juga tampak pada disposisi sebagai kepala sekolah dalam mengakomodir adanya kebutuhan guru yang disesuaikan jenis kelamin peserta didiknya dibidang bimbingan konseling dengan tujuan bahwa jika perempuan dengan perempuan akan lebih leluasa dalam menyampaikan masalah. Hal ini telah menunjukkan bahwa sikap akomodatif sekolah yang menyediakan tiga orang pendidik pada bidang bimbingan konseling. Hal ini dapat disimpulkan dalam proses pembinaan SMPI al Maarif telah menerapkan responsif yang baik terhadap peserta didik.

#### **5.1.4 Struktur Birokrasi**

Adapun proses dalam prosedur aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada setiap harinya sesuai dengan standart ditetapkan sekolah, tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktifitas kegiatan, atau program pada setiap struktur organisasi kerja pada bidangnya masing-Masing. Teori Edward III mengatakan apabila struktur birokrasi tidak efisien maka implementasi kebijakan belum dapat dikatakan efektif (Subarsono, 2011).

Struktur dengan tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan ketentuan yang sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokkan ke dalam berbagai wewenang terpusat. Struktur birokrasi yang ada di SMPI al Maarif. Berdasarkan hasil data yang diperoleh dalam implementasi kebijakan segregasi kelas berbasis gender meliputi aspek struktur organisasi,

pembagian wewenang dan hubungan kerjasama. Pengorganisasian dan pengelola dalam pelaksanaan kebijakan segregasi kelas berbasis gender adalah kepala sekolah, kepala tata usaha, kepeserta didikan, kurikulum, bendahara, humas, dan dewan guru pengajar. Semua jabatan tersebut telah memiliki tugas masing-masing. Kepala sekolah memberikan tugas kepada semua jabatan beserta anggota berdasarkan pengamatan keahlian, kegemaran, dan keterampilan yang dimiliki guru maupun karyawan. Administrasi dalam menerapkan kebijakan segregasi kelas berbasis gender yang sudah tertata secara baik, koordinasi antar guru yang melaksanakan kebijakan cukup tertata mulai guru BK, guru tatib dalam menangani peserta didik yang bermasalah, sekolah yang cepat tanggap ada kejadian seperti aksi, langsung melakukan tindakan pendekatan ke peserta didik. Menurut Sudirman, (2013) kerja sama yang baik antar guru dapat membantu kesulitan belajar peserta didik di sekolah. Hal ini sesuai dengan pengertian dtruktur birokrasi yaitu mencakup aspek-aspek struktur organisasi, pembagian wewenang, hubungan antar unit dalam organisasi, hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya (Leo, 2006).

Hal ini termasuk koordinasi antar organisasinya sangat efisien. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka dapat diketahui bahwa keempat komponen tersebut yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi telah diterapkan dengan sebagaimana mestinya sehingga mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan segregasi kelas berbasis gender.

## **5.2 Faktor Penghambat Dan Solusi Kebijakan Segregasi Kelas Berbasis Gender Di SMPI Al-Maarif 01 Singosari**

Berbagai upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk meralisasikan kebijakan segregasi kelas berbasis gender sarana prasarana, sumberdaya manusia, maupun sumberdaya finansial sudah di upayakan semaksimal mungkin tatapi masih ada kendala antara lain adalah: 1) Awal implemnetasi kebijakan segregasi kelas berbasis gender pada tahun ajaran baru 2017 dari sekian peserta didik laki-laki kelas VII dan IX sebagian diantara mereka ada yang tidak setuju dengan adanya penerapan segregasi kelas berbasis gender. Artinya peserta didik laki-laki kelas VII dan IX yang tidak setuju dengan adanya kebijakan tersebut, hingga melakukan aksi demo alasannya menurut kepala sekolah dan sebagian guru, hal tersebut

wajar karena peserta didik mengalami masa transisi akan tetapi berdampak pada interaksi dalam kelas sejenis yaitu kelas putra yang kurang kondusif saat jam pelajaran. Karena kelas tersebut dibentuk dari kelas campuran yang terdiri dari teman dengan jenis kelamin berbeda. 2) Kurangnya tenaga pendidik yang secara khusus untuk guru pengajar peserta didik laki-laki lebih dominan, menjadi salah satu penyebab tidak sesuai alur dan mekanisme pelaksanaan kebijakan. Selain itu, tidak seiramnya rencana kepala sekolah dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan mekanisme bahwa guru laki-laki khusus mengajar kelas laki-laki dan guru perempuan mengajar dikelas perempuan, disebabkan perekrutan seluruh pegawai al Maarif 01 Singosari harus mengikuti sistem dari yayasan. 3) Tidak seimbang jumlah peserta didik antara laki-laki dan perempuan, dan lebih banyak peserta didik laki-lakinya, hal ini berdampak pada ruangan untuk kelas laki-laki kelebihan karena ruangan kelas di sekolah dibuat maksimal 40 peserta didik hal ini disebabkan adanya pembagian kelas antara peserta didik laki-laki dan perempuan itu maka ada kelebihan dominan peserta didik laki-laki, dan untuk penambahan ruangan terkendala karena minimnya lahan tanah.

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaannya, memaparkan mengenai strategi yang dilakukan sekolah untuk mengatasi kendala yang terjadi diantaranya sebagai berikut: seperti: 1) Mengatasi dengan cara terus menerus melakukan pendekatan yaitu kepala sekolah terus melakukan pendekatan-pendekatan kepada peserta didik, dengan memberikan pengertian dan menjelaskan tujuan dibuat kebijakan segregasi kelas berbasis gender; semua guru maupun guru pengampu mata pelajaran khususnya, pendekatan harus terus dioptimalkan. Pendekatan secara umum ini diproyeksikan untuk mengenal dan mengetahui ciri umum dan khas dari peserta didik SMPI al Maarif. Setiap guru dan khususnya guru BK harus mengetahui segala problema yang sering terjadi pada peserta didik SMPI al Maarif. Segregasi kelas berbasis gender ini juga didedikasikan untuk menguatkan mental para peserta didik SMPI al Maarif. yang paling penting dalam tindakan pencegahan ini adalah ditanamkannya kepada setiap peserta didik SMPI al Maarif sebuah pendidikan dan pengertian bahwa segregasi kelas berbasis gender ini merupakan batas yang membatasi kelas laki-laki dan perempuan dalam hal pergaulan, namun tidak

dalam prestasi. Ini juga merupakan sebuah orientasi dan penyesuaian diri yang ditanamkan oleh SMPI al Maarif kepada peserta didiknya, yakni mengarahkan setiap pribadi peserta didik ke arah pembatasan berbasis gender tersebut. Beberapa solusi telah dilakukan sekolah untuk mengatasi masalah yang terjadi. 2) Usulan dewan guru untuk menggunakan mic sebagai media dalam menyampaikan pelajaran khusus kelas laki-laki disebabkan jumlah peserta didik dikelas laki-laki lebih banyak. 3) Rencana tahun ajaran baru selanjutnya untuk membatasi jumlah penerimaan peserta didik yaitu maksimal 240 peserta didik 120 peserta didik perempuan dan 120 peserta didik laki-laki, karena disesuaikan dengan jumlah kelas yang ada di SMPI al Maarif 01 Singosari.

## **6. PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 1) Implementasi kebijakan segregasi kelas berbasis gender yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktru birokrasi sudah terlaksana sesuai tahapan implementasi kebijakan dan berdampak terhadap sikap peserta didik, namun hasil yang diperoleh belum maksimal hal tersebut dipengaruhi pada sumber daya yaitu keberadaan sumber daya pendukung yang masih kurang untuk menunjang implementasi kebijakan segregasi kelas berbasis gender, 2) Hambatan yang dihadapi sekolah yaitu adanya beberapa peserta didik yang kurang mendukung pelaksanaan kebijakan, minimnya sumber daya pendukung, tidak sesuai alur dan mekanisme kepala sekolah dalam pelaksanaan kebijakan. Solusi dan strategi yang dilakukan sekolah berkaitan dengan kendala yang ada dengan melakukan memberikan arahan terhadap peserta didik melalui pendekatan, memberdayakan sumber daya yang ada secara maksimal, membuat rencana dengan membatasi jumlah penerimaan peserta didik yang bersifat sementara dan kondisional.

### **6.2 Saran**

Berikut ini beberapa rekomendasi berkaitan dengan implementasi kebijakan segregasi kelas berbasis gender yang bisa diberikan kepada sekolah, masyarakat, dan peneliti meliputi: 1) Implementasi kebijakan segregasi kelas berbasis gender yang kurang maksimal, hendaknya menjadi kajian ulang terhadap keterlaksanaan kebijakan. Perencanaan yang matang akan menjadi faktor pendukung terhadap



keterlaksanaan suatu kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik, 2) Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan hendaknya dicermati oleh pihak sekolah, terutama tentang sumber daya pendukung, agar permasalahan lain tidak muncul dikemudian hari. Solusi dari sebuah permasalahan yang muncul dari kebijakan yang dibuat pihak sekolah bersifat sementara dan kondisional. Hal ini terkait dengan kondisi keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana sekolah yang ada. Jika sarana prasarana, kondisi, dan jumlah guru yang ada sudah memenuhi hendaknya sekolah bisa menerapkan kebijakan tersebut dengan maksimal.



## 7. RUJUKAN

- Ahmadi, I. (2015). Implementasi Pemisahan Kelas Peserta Didik Laki-laki dan Perempuan dan Implikasinya Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas IX SMP IT Masjid Syuhada Yogyakarta. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2015.
- Ampera Dina. (2012). Kajian Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan di Sekolah Dasar Mitra PPL PGSD. *Jurnal Tabularasa PPS Unimed*, 9(2), 229–246.
- Anthony, B., & Lee Valerie. (1986). Effects of Single-Sex Secondary Schools on Student Achievement and Attitudes”. *Journal of Educational Psychology*, 78.
- Baidowi, A. (2005). *Tafsir Feminis: Kajian Perempuan dalam al-Qur'an dan Para Mufasir Kontemporer*. Bandung: Nuansa.
- Basyari, Ahmad, H. (2017). *Membangun Sekolah Islam Unggulan*. Surabaya: Penerbit Erlangga.
- Brief Advocacy. (2007). Single-Sex Schools for Girls and Gender Equality in Education - UNESCO.
- Budiastuti Wiratmo, L., & Mochamad, G. (2008). Representasi Perempuan Dalam Majalah Wanita. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 3(1), 1–10.
- Casmini, M. (2017). Pendidikan Segregasi Gender.
- Darmiyati, Z. (2008). *Humanisasi Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Handayani Trisakti. (2016). Kemerosotan Moral: Hambatan Menuju Generasi Berkarakter (telah kritis atas melemahnya pendidikan moral dalam dunia pendidikan. In *Seminar Internasional, MKPP.UMM*. Malang: Seminter Internasional, UMM.
- Jackson, C. (2002). Can Single-sex Classes in Co-Educational Schools Enhance the Learning Experiences of Girls and/or Boys? An Exploration of Pupils' Perceptions". *Educational Research*, 28.
- Kreitz-Sandberg, S. (2013). Stakeholders' Strategies and Dilemmas in Swedish Teachers' Education. *Gender Inclusion and Horizontal Gender Segregation*.
- Leo, A. (2006). *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Lexy J, M. (2011). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lexy J, M. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.
- Megasari. (2014). Pola Interaksi Berbasis Gender dalam Pembelajaran Sosiologi Siswa Kelas X. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3.
- Muafiah, E. (2013). Pendidikan Perempuan di Pondok Pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7.

- Mujianto, S. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi. *Jurnal Studi Islam*, 6, 148–178.
- Nasional, U. S. P. (2003). Undang-undang sistem pendidikan nasional.
- Parker, L. H., & Rennie, L. . (1997). Students' and Teachers' Perceptions of Single-Sex and Mixed-Sex Mathematics Classes. *Mathematics Education Research Journal*, 9(3).
- Rohmah, N. (2008). Segregasi Gender dalam Pembelajaran Ilmu Falak DI Pesantren Salafiyah Lirboyo Kediri Dan Pesantren Modern Assalam Surakarta Sebagai Upaya Pemberdayaan Peran Perempuan, 0–23.
- Rohmawati, N. (2016). *Manajemen Peserta Didik Di Lembaga Pendidikan Islam (Studi Analisis Terhadap Sistem Segregasi Gender di Madrasah Aliyah Sunan Pandanaran Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)*. Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga.
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumbuha, U. (2008). *Spektrum Gender*. Malang: UIN- Malang Press.
- Taqiyah Barotut. (2016). Pengaruh Pemisahan Kelas Peserta Didik Laki-laki dan Perempuan Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas X Pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak di MA Sunan Pandanaran Yogyakarta. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Tirtarahardja. (2005). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Vasyura, S. . (2008). Psycholog of Male and Female Communicative Activity. *The Spanish Journal*, 11.
- Yulianto, T., & Dwijananti, P. (2013). Studi Perbandingan Hasil Belajar Fisika Sesaat Kelas Putra, Kelas Putri, dan Kelas Campuran pada Materi Getaran di SMA N 1 Kradenan Kabupaten Grobongan. *Unnes Physics Education Journal*, 2.

## **Lampiran 1**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **Implementasi Kebijakan Segregasi kelas berbasis gender di SMPI al Maarif 01 Singosari**

#### **Untuk Kepala Sekolah & Wakil Kepala Bag. Kesiswaan SMPI al Maarif 01 Singosari**

##### **Identitas Informan**

1. Nama :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. Umur :
4. Jenis Kelamin :
5. Jabatan :
6. Pendidikan Terakhir :

##### **I. Item Pertanyaan (Implementasi Kebijakan Segregasi kelas berbasis gender)**

1. Bagaimana awal mula diterapkannya kebijakan segregasi kelas berbasis gender dalam tata tertib sekolah?
2. Adakah dasar aturan yang melandasi diterapkannya kebijakan segregasi kelas berbasis gender dalam tata tertib sekolah?
3. Bagaimana tanggapan wali murid dengan diterapkannya kebijakan segregasi kelas berbasis gender dalam tata tertib sekolah?
4. Apa tujuan yang ingin dicapai sekolah dengan diterapkannya kebijakan segregasi kelas berbasis gender?
5. Apa strategi yang dilakukan sekolah agar tujuan kebijakan segregasi kelas berbasis gender yang telah direncanakan dapat tercapai?
6. Bagaimana kelengkapan sarana dan prasarana sekolah untuk mendukung berjalanya kebijakan segregasi kelas berbasis gender?
7. Siapa saja komponen sekolah yang terlibat dalam menjalankan kebijakan segregasi kelas berbasis gender?
8. Bagaimana dengan prosedur pelaksanaan kebijakan segregasi kelas berbasis gender ketika diterapkan di sekolah?
9. Seberapa besar tingkat kepatuhan siswa dalam mematuhi kebijakan segregasi kelas berbasis gender?
10. Bagaimana reaksi siswa ketika sekolah menerapkan kebijakan segregasi kelas berbasis gender pelanggaran dalam tata tertibnya?
11. Apakah keterlaksanaan kebijakan segregasi kelas berbasis gender sudah sesuai dengan tujuan/target yang ingin dicapai?

## **II Item pertanyaan (Kendala dan Solusi Kebijakan)**

1. Apakah dalam menerapkan kebijakan segregasi kelas berbasis gender pihak sekolah menemukan permasalahan yang timbul, sehingga mengganggu pelaksanaan kebijakan segregasi kelas berbasis gender?
2. Bagaimana pihak sekolah menyikapi masalah yang timbul dalam menerapkan kebijakan segregasi kelas berbasis gender?
3. Apa saja yang perlu dilakukan pembenahan dari pelaksanaan kebijakan segregasi kelas berbasis gender?



## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Implementasi Kebijakan Segregasi kelas berbasis gender di SMPI al**

#### **Maarif 01 Singosari**

#### **Untuk Guru SMPI al Maarif 01 Singosari**

##### **Identitas Informan**

1. Nama :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. Umur :
4. Jenis Kelamin :
5. Jabatan :
6. Pendidikan Terakhir :

##### **I. Item Pertanyaan (Implementasi Kebijakan Segregasi kelas berbasis gender)**

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang adanya kebijakan segregasi kelas berbasis gender di sekolah?
2. Bagaimana sosialisasi kebijakan segregasi kelas berbasis gender kepada bapak/ibu oleh kepala sekolah?
3. Apakah menurut Bapak/Ibu sumber daya yang ada sudah cukup menunjang untuk melaksanakan kebijakan segregasi kelas berbasis gender?
4. Bagaimana menurut Bapak/Ibu reaksi semua siswa ketika implementasi kebijakan segregasi kelas diterapkan?

##### **II. Item Pertanyaan (Kendala dan Solusi Kebijakan Segregasi kelas berbasis gender)**

1. Apa kendala dan permasalahan yang Bapak/Ibu temukan dalam melaksanakan kebijakan segregasi kelas berbasis gender?
2. Apa faktor yang mempengaruhi timbulnya permasalahan dalam menerapkan kebijakan segregasi kelas berbasis gender?
3. Bagaimana Bapak/Ibu mengatasi masalah yang timbul sehingga kebijakan segregasi kelas berbasis gender dapat terlaksana sebagai mana mestinya?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Implementasi Kebijakan Sgregasi kelas berbasis gender di SMPI al**

#### **Maarif 01 Singosari**

#### **Untuk Siswa SMPI al Maarif 01 Singosari**

##### **Identitas Informan**

1. Nama :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. Umur :
4. Jenis Kelamin :
5. Kelas :

##### **I. Item Pertanyaan (Penerapan segregasi kelas berbasis gender)**

1. Bagaimana pendapat anda tentang kebijakan sekolah menerapkan kebijakan segregasi kelas berbasis gender?
2. Bagaimana kondisi kelas ketika dipisah apakah kondusif atau tidak?
3. Apa tindak lanjut/hukuman yang diberikan guru kepada siswa yang melanggar?

## Lampiran 2

### PEDOMAN OBSERVASI

#### **Petunjuk Observasi:**

1. Perkenalkan diri dan jelaskan maksud kedatangan.
2. Jelaskan topik penelitian serta tujuan observasi dilakukan.
3. Jelaskan bahwa informan bebas menyampaikan pendapat, pengalaman, harapan atau saran yang berkaitan dengan topik observasi.
4. Catat seluruh kegiatan dan hasil observasi.

#### **Pertanyaan Observasi**

1. Bagaimana kondisi secara umum SMPI al Maarif 01 Singosari?
2. Bagaimana kondisi secara umum siswa SMPI al Maarif 01 Singosari?
3. Bagaimana kondisi secara umum sarana dan prasarana SMPI al Maarif 01 Singosari?
4. Bagaimana kondisi tempat kegiatan Ismubah siswa SMPI al Maarif 01 Singosari?
5. Bagaimana siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah?
6. Bagaimana interaksi yang terjadi antara siswa laki-laki dan siswa perempuan di sekolah?



### Lampiran 3

#### Dokumentasi



**Wawancara kepala sekolah (KS)**



**Wawancara guru Tatib (GTT)**



**Wawancara kesiswaan (KSS)**



**Wawancara guru BK (GBK)**

## Dokumentasi aktifitas sekolah



Bentuk segregasi kelas Perempuan

## Dokumentasi aktifitas sekolah



Siswa laki-laki saat jam olahraga tetap dipisahkan dengan perempuan



Bentuk segregasi kelas laki-laki



Siswa laki-laki saat sholat berjamaah tetap dipisah laki-laki berada paling depan



Siswa laki-laki saat jam olahraga tetap dipisahkan dengan perempuan



Salah satu kegiatan ekstrakurikuler disekolah tetap digabung, siswa laki-laki maupun perempuan



#### Lampiran 4

#### STUDI DOKUMEN

#### Implementasi Kebijakan Segregasi kelas berbasis gender di SMPI al M 01 singosari

No	Dokumen	Keberadaan dokumen		Keterangan
		Ada	Tidak	
1	Profil Sekolah	✓		Arsip
2	Visi Misi Sekolah	✓		Arsip
3	Tata Tertib Sekolah	✓		Arsip
4	SK Kepala Sekolah tentang Segregasi kelas berbasis gender		✓	Masih berbentuk lisan
5	Rekapitulasi jumlah siswa Dan kelas	✓		Arsip
6	Data pelanggaran siswa	✓		Arsip

## **Lampiran 5**

### **DATA SELURUH RUANG SMP ISLAM ALMAARIF 01 SINGOSARI MALANG**

Prasarana ruang yang terdapat di SMP Islam Almaarif 01 terdiri dari :

#### **A. Lantai Satu**

1. 1 ruang Koperasi
2. 1 ruang Tata Usaha
3. 1 ruang Perpustakaan
4. 2 ruang Gudang
5. 1 ruang UKS
6. 7 ruang Kelas
7. 1 ruang Kepala Sekolah
8. 1 ruang Bendahara
9. 1 ruang Guru
10. 1 pos satpam
11. 3 ruang kantin
12. 2 Kamar Mandi Siswa
13. 1 Kamar Mandi Guru dan staf
14. 1 ruang dapur

#### **B. Lantai dua**

1. 1 ruang OSIS
2. 1 ruang TIK
3. 1 ruang Musholla
4. 1 ruang penjaga sekolah
5. 1 Kamar Mandi Guru dan staf
6. 1 Kamar Mandi Siswa
7. 1 Gudang
8. 1 ruang Konseling
9. 7 ruang Kelas

#### **C. Lantai tiga**

1. 10 ruang Kelas
2. 1 ruang Lab IPA

Jumlah keseluruhan ruang di lingkungan sekolah adalah penggabungan dari lantai satu, dua dan tiga, yaitu :

**48 Ruang**

**KODE CATATAN LAPANGAN**  
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SEGREGASI KELAS BERBASIS**  
**GENDER DI SMPI al MAARIF 01 singosari**

**A. Kode teknik pengumpulan data**

1. Kode Wawancara : W
2. KS : Kepala Sekolah SMPI al maarif 01 singosari
3. WK : Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan 3.
4. GBK : Guru Bimbingan Konseling
5. GTU: Guru Tata Usaha
6. SP : Perwakilan siswa perempuan
7. SL : Perwakilan siswa Laki-laki

**B. Cara Membaca Kode**

(W. KS. 04 Agustus 2018)

= W : Wawancara

=S : Kepala Sekolah SMPI al Maarif 01 Singosari

=04 Agustus 2017 : Tanggal pelaksanaan wawancara.

